

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perwakafan Muhammadiyah

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu pada tahun 1914 Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang mengelola harta benda wakaf, telah memperoleh status badan hukum, dan menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Dan status organisasi keagamaan sebagai nazhir telah diakui oleh Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Muhammadiyah berdiri sejak tahun 1912 dan dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdid). Gerakan tajdid memiliki misi ganda, yaitu misi pemurnian dan reformasi. Imron Rosyadi mengutip pendapat Jainuri menyatakan bahwa, gerakan tajdid dalam wujud pemurnian dilakukan untuk mengembalikan ajaran Islam pada dua sumber pokok ajaran islam yaitu al-Qur'an dan as- Sunnah.¹³

Sedangkan misi gerakan tajdid dalam wujud reformasi dilakukan untuk perubahan bidang muamalat. Tajdid dalam muamalat ini dilakukan dengan ijtihad sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan tantangan perkembangan dalam tempat dan waktu tertentu.¹⁴

¹³ Imron Rosyadi. 2013. *Corak Pembaharuan Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Surakarta. Tajdida.Vol.11. No.2. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 119.

¹⁴ ibid

Perwakafan Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan semangat pembaharuan yakni dalam arti peningkatan, pengembangan dan modernasi adalah berupa wakaf produktif yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir. Muhammadiyah mengelola harta wakaf untuk kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa, agar menjadi wakaf produktif.

Dengan slogan kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.¹⁵

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan diubah menjadi Majelis Wakaf Zakat Infaq dan Shadaqah pada Muktamar ke- 45 yaitu pada tahun 2005, kemudian diubah lagi menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada Muktamar Muhammadiyah ke- 46 di Yogyakarta. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah Organ Organisasi Pembantu Pimpinan. Majelis ini dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Jajaran organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dibentuk pula pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota)

¹⁵ *Sejarah wakaf muhammadiyah*. wakaf.muhammadiyah.or.d. diakses pada tanggal 25 September 2017

dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang menjadi kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ¹⁶

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah atau Cabang di wilayahnya masing-masing.¹⁷

Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana ibadah dan sarana sosial. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan Muhammadiyah telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

B. Tinjauan Tentang Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf menurut bahasa arab berarti "*al-habsu*" yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara'/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁸

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu : "Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk

¹⁸ Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*.Bandung, Rajawali Press. 1992. Hal. 23.

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991) Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama

2. Dasar Hukum Wakaf

1) Dasar hukum di dalam Al-Quran

Dalam wakaf terdapat beberapa dasar hukum yaitu dari Al-Quran dan juga dari Hadits. Meskipun dalam Al-Quran tidak secara langsung menjelaskan tentang perwakafan namun ada beberapa ayat yang apabila di telaah dapat dijadikan hujjah mengenai ibadah wakaf, memang seara tidak langsung ayat-ayat tersebut tidak khusus membahas tentang masalah wakaf, melainkan mencakup masalah wakaf, Ayat-ayat yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁹

“Wahai orang-orang yang beriman ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung” (QS: al-Hajj: 77).

Selanjutnya dalam surat li-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²⁰

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS: Ali-Imran:92).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya arti kebajikan yaitu berupa kesedian seseorang untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi orang lain, dimana seseorang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT sebelum ia memberikan sebagian hartanya salah satunya yaitu dengan cara mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2005), hal. 34.

²⁰*Ibid.*, hal. 63.

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan 267 sebagai berikut :²¹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: Al-Baqarah: 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS: Al-Baqarah: 267)

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 46.

Dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh kepada ummatnya untuk memberikan sebagian harta dari usahanya yang mana apabila orang tersebut memberikan sebagian hartanya dan harta tersebut diambil manfaatnya tanpa merubah bentuknya maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

2) Dasar hukum di dalam Hadits

Meskipun dalam Al-quran tidak membahas secara langsung. Namun, ada beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang perwakafan. Berikut pernyataan dari hadits yang dimaksud:

عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²²

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah

²² Shahih Muslim, *Bi Syar'i An-Nawawi*, Juz XI (Mesir : Mabribah, 1930), hal. 86.

jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

Sebenarnya yang dimaksud dengan hadits diatas tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak shaleh. Jika di kaitkan dengan wakaf maka bisa diambil makna dari sedekah jariyah bisa berupa tanah, yang mana sedekah itu bisa berjalan terus menerus meskipun orang yang memberikan sedekah telah meninggal dunia.

Adapun masih ada beberapa hadits yang berkaitan dengan perwakafan, perbedaan dari hadits diatas adalah hadits yang ini lebih tegas menggambarkan tentang ibadah wakaf. Yaitu saat Nabi Muhammad memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سَلِيمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَأَلْتُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ²³

"Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Riyadh : Dar At-Tayyibah, 2006), hal. 14.

Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." [Ibnu 'Aun] berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Zaidah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq] telah mengabarkan kepada kami [Azhar As Saman]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Adi] semuanya dari [Ibnu 'Aun] dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad dan seterusnya." Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud Al Hafari Umar

bin Sa'd] dari [Sufyan] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari [Umar] dia berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut....kemudian dia melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga setelahnya."

Mengenai hadits diatas hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan diantara para sahabat tidak meragukan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut beberapa ulama madzab tidak ada perbedaan signifikan yang menjelaskan tentang wakaf.

3) Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Wakaf juga diatur dalam KHI buku III tentang hukum perwakafan.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- 1) Ada orang yang berwakaf (wakif);
- 2) Nazhir;
- 3) Harta benda wakaf ;
- 4) Ikrar wakaf ;
- 5) Peruntukkan harta benda wakaf ;
- 6) Jangka waktu wakaf .

4. Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 : “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”

Harta benda wakaf yang diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak;
- 2) Benda bergerak.

Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, dapat juga diikuti dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya dan tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 2) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek wakaf pada pasal 15 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengatur bahwa benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa;

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Didalam ketentuan Pasal 22 Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan sebagai;

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang- undangan.

5. Pihak-pihak Yang Terkait dengan Wakaf.

1) Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2: “Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya” Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi :

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa syarat seorang wakif perseorangan adalah :

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilih sah harta benda wakaf

Wakif badan hukum/organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum/organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik nya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum/organisasi tersebut.

2) Nadzir

Pengertian nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut : “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nazhir juga harus mempunyai syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani

- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah:

- a. Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat Nazhir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nadzir mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir juga berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

3) PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.”

Akta Ikrar Wakaf (AIW) termasuk dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. PPAIW harta benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
- d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- e. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan wakaf atau Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian keempat : Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Pasal 55 bahwasanya :

- a. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- b. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 56 bahwasanya : Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 57 :

- a. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden dan Menteri.

- b. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Kemudian dalam Pasal 58 juga diterangkan bahwasanya : Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

4) Badan Wakaf Indonesia

Pengertian badan wakaf menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu : “Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.” Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004 badan wakaf, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pasal 54 UU Nomor

41 Tahun 2004 Anggota badan wakaf Indonesia harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. WNI
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dari ekonomi syariah
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional
- i. Serta persyaratan lain untuk menjadi anggota badan wakaf Indonesia di tetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

5) Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala. Tugas dari BPN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai ketentuan dan peraturan undang-undang

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁴ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁵

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁶

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga. Citra Aditya. Bandung. 2013. Hal 67.

²⁵ Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan. 2005. Hal 109.

²⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama. ctk Kesatu. Rajawali Press. Jakarta. 2013. Hal. 375

teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.²⁷

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Efektif atau Tidaknya Suatu Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu²⁸ :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidak semata- mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut memper timbangkan faktor- faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi

²⁷Soleman B Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta.1993. Hal 47-48.

²⁸ Soerjono Soekanto.*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada. 2007. hal. 110.

perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai- nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra- produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.

Langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor- faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁹

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila³⁰ :

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

²⁹ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55

³⁰ Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdanan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2011. Hal. 71-71.